



LAPORAN KINERJA 2025

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Affandi CT X/11
Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY
Telepon/Fax : (0274) 520054 / (0274) 520462
Website: www.ombudsman.go.id
Desember 2025

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas publik dan transparansi atas pelaksanaan tugas kami dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selama satu tahun penuh.

Tahun 2025 menjadi tahun yang dinamis bagi Ombudsman RI Perwakilan DIY. Selain adanya transisi kepemimpinan di awal tahun, kami juga menghadapi tantangan efisiensi anggaran akibat kebijakan pemerintah pusat. Namun, kendala tersebut kami respons dengan strategi inovatif, termasuk penguatan fungsi "jemput bola" melalui kegiatan Ombudsman On The Spot dan optimalisasi penyelesaian laporan secara informal melalui program RCO+.

Sepanjang tahun ini, kinerja kami berfokus pada penyelesaian laporan masyarakat yang didominasi oleh sektor pendidikan dan agraria, serta upaya pencegahan maladministrasi melalui kajian sistemik tata kelola sampah dan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok. Seluruh capaian ini tidak lepas dari sinergi yang kuat dengan instansi pemerintah daerah, kepolisian, jejaring masyarakat, dan media massa.

Kami menyadari bahwa perbaikan pelayanan publik adalah proses berkelanjutan. Oleh karena itu, masukan yang membangun sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas pengawasan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat dalam upaya bersama mewujudkan pelayanan publik yang bebas maladministrasi, adil, dan prima di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, Desember 2025

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Muflihul Hadi
Kepala Perwakilan

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
Ringkasan Eksekutif.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
BAB II RENCANA KINERJA.....	7
Perjanjian Kinerja.....	7
Penetapan Kinerja.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
Pengukuran Capaian Kinerja.....	10
Analisis Capaian Kinerja.....	11
Realisasi Anggaran.....	12
BAB IV PENUTUP.....	14

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Rangkuman Tugas Pokok dan Fungsi

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY merupakan lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, mencakup penyelenggara negara, pemerintahan, BUMN, BUMD, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas pelayanan publik tertentu. Fungsi utama perwakilan ini meliputi penerimaan, verifikasi, dan pemeriksaan laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi, serta pelaksanaan langkah pencegahan. Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman RI Perwakilan DIY berkomitmen memastikan terciptanya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.

B. Kondisi Unit Kerja Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi periode yang diwarnai oleh perubahan struktur kepemimpinan dan dinamika pengelolaan sumber daya. Pada awal tahun, terjadi transisi kepemimpinan Kepala Perwakilan dari Bapak Budhi Masthuri kepada Bapak Muflihul Hadi yang efektif bertugas sejak 2 Februari 2025. Sisi Sumber Daya Manusia (SDM) juga mengalami penguatan dengan penambahan tiga personel baru (dua PNS dan satu Asisten), sehingga total kekuatan SDM kini berjumlah 28 orang. Dari sisi anggaran, tantangan efisiensi sempat dihadapi akibat kebijakan pemblokiran di awal tahun sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025. Meski demikian, akses anggaran dibuka kembali pada pertengahan tahun, sehingga realisasi per Desember 2025 berhasil mencapai Rp 606.540.861 atau setara 99,53% dari total pagu efektif.

C. Ringkasan Capaian Kinerja dan Tindak Lanjut

Secara keseluruhan, Ombudsman RI Perwakilan DIY berhasil melampaui target kinerja utama yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pada aspek penyelesaian laporan, kinerja sangat positif dengan penyelesaian 274 laporan dari target 179 laporan, yang menempatkan capaian kinerja di angka 153%. Keberhasilan ini didukung oleh inovasi RCO+ (Reaksi Cepat Ombudsman Plus) yang mengutamakan penyelesaian informal. Selama tahun berjalan, tercatat total 347 akses masyarakat yang masuk, didominasi oleh substansi Pendidikan (terutama isu penahanan ijazah dan PPDB) serta masalah Agraria/Pertanahan.

Di bidang pencegahan maladministrasi, capaian kinerja juga memenuhi target pada indikator kunci, termasuk penyelesaian kajian sistemik mengenai Tata Kelola Sampah di DIY dan pembentukan kelompok partisipasi masyarakat. Pengawasan intensif juga dilakukan terhadap momentum krusial seperti pelaksanaan PPDB, distribusi LPG 3Kg, dan pembayaran THR, meskipun terdapat catatan evaluasi pada indikator penilaian Pemerintah Daerah yang baru terealisasi 50%. Sebagai tindak lanjut, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan saran korektif telah disampaikan kepada instansi terlapor, menghasilkan dampak nyata seperti pengembalian ijazah yang ditahan, perbaikan sistem zonasi PPDB, serta respons kebijakan daerah terkait tata kelola sampah dan penataan utilitas fiber optik.

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan lembaga negara pengawas pelayanan publik yang memiliki peran strategis dalam menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas, adil, dan bebas dari maladministrasi. Sebagai perwakilan yang telah berdiri sejak tahun 2004, keberadaan Ombudsman RI DIY terus relevan di tengah dinamika kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang prima. Pada tahun 2025, pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dihadapkan pada tantangan internal dan eksternal yang cukup signifikan. Secara internal, tahun ini menjadi masa transisi kepemimpinan dan penyesuaian manajerial pasca pelantikan Kepala Perwakilan baru pada awal Februari 2025, serta adanya kebijakan efisiensi anggaran (pemblokiran) dari pemerintah pusat di awal tahun yang menuntut strategi adaptif dalam pengelolaan program kerja.

Meskipun menghadapi kendala anggaran dan transisi organisasi, Ombudsman RI Perwakilan DIY tetap konsisten merespons isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Sepanjang tahun 2025, isu sektor pendidikan, khususnya terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan penahanan ijazah, serta sektor agraria terkait pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional, menjadi sorotan utama pengawasan. Guna menjawab tantangan tersebut, Ombudsman RI DIY mengintensifkan strategi "jemput bola" melalui kegiatan *Ombudsman On The Spot* dan optimalisasi penyelesaian laporan secara informal (RCO+), yang bertujuan mempercepat penyelesaian keluhan masyarakat tanpa mengurangi substansi pengawasan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas upaya-upaya tersebut dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

1.2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Ombudsman RI Perwakilan DIY menjalankan fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau daerah.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan DIY memiliki tugas utama menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain penanganan laporan, tugas pencegahan maladministrasi juga menjadi prioritas melalui kajian sistemik, survei kepatuhan, dan pendampingan kepada penyelenggara layanan. Kewenangan yang dimiliki meliputi hak untuk meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis, memeriksa dokumen, memanggil pelapor, terlapor, dan pihak

terkait lainnya, serta mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang memuat rekomendasi atau saran tindakan korektif guna perbaikan kualitas pelayanan publik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3 Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi Ombudsman RI Perwakilan DIY pada tahun 2025 mengalami dinamika penyesuaian untuk mendukung optimalisasi kinerja. Pada awal tahun, struktur organisasi didasarkan pada Keputusan Kepala Perwakilan Nomor 001-13 Tahun 2025 tanggal 14 Januari 2025 yang dipimpin oleh Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Perwakilan. Selanjutnya, seiring dengan dilantiknya Kepala Perwakilan definitif, dilakukan penyesuaian kembali melalui Keputusan Kepala Perwakilan Nomor 010-13 Tahun 2025 yang berlaku efektif mulai 2 Juni 2025.

Secara garis besar, struktur organisasi terdiri dari Kepala Perwakilan yang membawahi empat unit kerja utama, yaitu Kelompok Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), Keasistenan Pemeriksaan Laporan, Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, dan Kesekretariatan. Unit PVL bertugas sebagai garda terdepan dalam menyaring akses masyarakat, Unit Pemeriksaan berfokus pada penyelesaian sengketa dan investigasi maladministrasi, Unit Pencegahan melakukan kajian dan penilaian kepatuhan, serta Kesekretariatan memberikan dukungan manajemen, administrasi umum, keuangan, dan kerumahtanggaan.

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2025 tercatat sebanyak 28 orang pegawai. Komposisi ini terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 15 orang Asisten Ombudsman yang tersebar di berbagai keasistenan, 6 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengisi fungsi dukungan manajemen dan calon asisten, serta 6 orang Tenaga Pendukung (PPNPN). Pada tahun berjalan, terdapat penguatan formasi SDM dengan adanya penambahan 3 personel baru, yang meliputi 2 orang PNS dan 1 orang Asisten Ombudsman yang merupakan pindah tugas dari pusat, guna memperkuat kapasitas pengawasan dan dukungan administrasi di lingkungan Perwakilan DIY.

BAB II

RENCANA KINERJA

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia, yang kemudian diturunkan ke tingkat perwakilan daerah. Bab ini menguraikan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan Penetapan Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan Ombudsman RI Perwakilan DIY sepanjang tahun 2025.

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah dokumen kesepakatan kinerja antara Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY selaku penerima amanah dengan Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia selaku pemberi amanah. Perjanjian ini merupakan wujud komitmen amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini didasarkan pada arah kebijakan lembaga untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat. Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja Perwakilan DIY difokuskan pada tiga sasaran strategis utama, yaitu:

1. **Efektivitas Penyelesaian Laporan:** Menitikberatkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat yang responsif dan penyelesaian investigasi atas prakarsa sendiri (IAPS) untuk isu-isu yang berdampak luas.
2. **Penguatan Pencegahan Maladministrasi:** Berfokus pada perbaikan sistemik melalui saran kebijakan (*policy brief*) dan partisipasi aktif masyarakat melalui jejaring pengawasan.
3. **Dukungan Manajemen yang Kuat:** Memastikan operasional perkantoran dan ketersediaan sarana prasarana yang mendukung kinerja pengawasan di tengah tantangan efisiensi anggaran.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja ini, setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*SMART*). Hal ini bertujuan agar kinerja Perwakilan DIY dapat dinilai akuntabilitasnya pada akhir periode pelaporan.

2.2. Penetapan Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani, Ombudsman RI Perwakilan DIY menetapkan target kinerja tahun 2025. Penetapan ini menjadi acuan dalam

pelaksanaan seluruh kegiatan operasional, mulai dari pemeriksaan laporan hingga kajian pencegahan.

Berikut adalah matriks Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Satuan, dan Target yang harus dicapai:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	Lembaga	1
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	Laporan	223
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Laporan	1
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	Saran Kebijakan	1
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	Kelompok Masyarakat	1
	Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah	3
Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	Layanan	1
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Paket	1

Tabel 2.1 Penetapan Target Kinerja Tahun 2025

Penjelasan Target Kinerja:

1. Penyelesaian Laporan (Target: 179 Laporan): Target ini ditetapkan dengan mempertimbangkan tren laporan masyarakat yang masuk pada tahun-tahun sebelumnya dan kapasitas SDM Asisten Pemeriksaan. Angka 179 merupakan target minimal laporan yang harus ditutup (diselesaikan), baik melalui mekanisme

- Respon Cepat Ombudsman (RCO), pemeriksaan reguler, maupun mediasi/konsiliasi. Target ini menjadi krusial mengingat tingginya kompleksitas masalah di DIY, khususnya di sektor pendidikan dan agraria.
2. Investigasi Atas Prakarsa Sendiri / IAPS (Target: 1 Laporan): Ombudsman RI DIY menargetkan minimal satu investigasi inisiatif (tanpa menunggu laporan warga) untuk merespons isu pelayanan publik yang viral atau berdampak sistemik namun warga takut melapor. Target ini diarahkan untuk isu-isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau kelompok rentan.
 3. Saran Kebijakan (Target: 1 Dokumen): Dalam fungsi pencegahan, Perwakilan DIY berkomitmen menyusun minimal satu kajian sistemik (systemic review) yang menghasilkan saran perbaikan kebijakan. Pada tahun 2025, fokus utama diarahkan pada isu tata kelola lingkungan atau kebutuhan dasar yang mendesak, seperti pengelolaan sampah yang menjadi masalah kronis di DIY.
 4. Kelompok Masyarakat & Focal Point (Target: 1 Kelompok & 1 Lembaga): Untuk memperluas jangkauan pengawasan, ditetapkan target pembentukan/pembinaan satu kelompok masyarakat (Jejaring Masyarakat Peduli Maladministrasi) dan satu lembaga sebagai focal point. Hal ini bertujuan untuk menciptakan partisipasi publik yang kritis, di mana masyarakat, termasuk mahasiswa dan pelajar, diberdayakan sebagai agen pengawasan partisipatif.
 5. Opini Pengawasan Pelayanan Publik (Target: 3 Pemda): Target ini mencakup penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik pada seluruh entitas Pemerintah Daerah di DIY, yaitu 1 Pemerintah Provinsi, 1 Pemerintah Kabupaten, dan 1 Pemerintah Kota. Kegiatan ini bertujuan mengukur dan mendorong kepatuhan penyelenggara layanan terhadap UU No. 25 Tahun 2009.
 6. Dukungan Manajemen: Target pengelolaan operasional dan pengadaan fasilitas ditetapkan sebanyak 1 layanan/paket untuk menjamin kelancaran tugas-tugas substansi di kantor yang berlokasi di Jl. Affandi CT X/11, Sleman. Dukungan ini mencakup pengelolaan anggaran, kepegawaian, dan pemeliharaan aset kantor.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pada bab ini, disajikan pengukuran capaian kinerja, analisis capaian kinerja secara komprehensif, serta realisasi anggaran Ombudsman RI Perwakilan DIY Tahun 2025.

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi yang dicapai pada akhir tahun pelaporan. Berdasarkan data rekapitulasi kinerja, secara umum Ombudsman RI Perwakilan DIY berhasil melampaui sebagian besar target yang ditetapkan, meskipun terdapat satu indikator yang belum maksimal akibat kendala eksternal.

Berikut adalah tabel pengukuran capaian kinerja Tahun 2025:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	Lembaga	1	1	100 %
Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	Laporan	223	274	123 %
Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Laporan	1	1	100 %
Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	Saran Kebijakan	1	1	100 %
Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	Kelompok Masyarakat	1	1	100 %
Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah	3	3	100 %
Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	Layanan	1	1	100 %

Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Paket	1	1	100 %
--	-------	---	---	-------

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Sub-bab ini menguraikan analisis mendalam terhadap capaian masing-masing Sasaran Strategis, faktor keberhasilan, kendala yang dihadapi, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

1. Sasaran Strategis: Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif

Pada sasaran ini, indikator utama penyelesaian laporan mencapai **123%**, jauh melampaui target yang ditetapkan (target 223, realisasi 274).

- Analisis Keberhasilan:
Lonjakan capaian ini didorong oleh penerapan inovasi RCO+ (Reaksi Cepat Ombudsman Plus) yang mulai diterapkan sejak awal tahun 2025. Melalui metode ini, laporan berkategori sederhana dan sedang diselesaikan melalui pendekatan informal (telepon/WhatsApp) langsung ke instansi terlapor segera setelah laporan diterima. Hal ini terbukti efektif memangkas waktu penyelesaian dan meningkatkan kepuasan pelapor serta instansi terlapor.
- Analisis Substansi:
Sektor yang mendominasi penyelesaian laporan adalah sektor Pendidikan (81 laporan) dan Agraria (54 laporan).
 - *Kasus Menonjol:*
Ombudsman berhasil menyelesaikan kasus penahanan ijazah di sekolah dan klinik kesehatan, serta masalah PPDB/SPMB jalur afirmasi yang tidak tepat sasaran.
 - *Investigasi (IAPS):*
Satu target IAPS terpenuhi (100%) dengan fokus pada isu yang berdampak luas. Salah satunya terkait pengawasan distribusi LPG 3 Kg dan kelangkaan kebutuhan pokok yang direspons cepat.
- Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya:
Meskipun jumlah akses masyarakat (347 akses) sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 (501 akses), tingkat penyelesaian laporan justru meningkat. Hal ini menempatkan Perwakilan DIY pada peringkat teratas (nomor 1) capaian jumlah penyelesaian tingkat nasional kategori kantor perwakilan pada semester 1/2.

2. Sasaran Strategis: Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi

Capaian pada sasaran ini bervariasi. Indikator saran kebijakan dan partisipasi masyarakat tercapai 100%, namun penilaian Opini Pengawasan Pelayanan Publik hanya mencapai 50%.

- Capaian Saran Kebijakan (100%):
Target 1 saran kebijakan terpenuhi melalui Kajian Tata Kelola Sampah di DIY. Kajian ini mendesak mengingat situasi darurat sampah di Yogyakarta.

Ombudsman melakukan wawancara mendalam ke Dinas Lingkungan Hidup dan UPT Sampah di 4 Kabupaten/Kota, menemukan kegagalan sistemik dalam pemilahan dan pengangkutan. Rekomendasi telah diserahkan dan ditindaklanjuti oleh Pemda¹⁵.

- Analisis Kegagalan Target Penilaian Opini (Capaian 100%):
Dari target menilai 3 Pemerintah Daerah, seluruhnya dapat terealisasi. Terjadi penyesuaian target dimana target yang ditetapkan sebelumnya sebanyak 6 Pemerintah Daerah. Sebagai dampak dari blokir anggaran, dilakukan asesment ulang terhadap target yang ditetapkan, kemudian direvisi menjadi 3 pemerintah daerah.
- Partisipasi Masyarakat (100%):
Target pembentukan jejaring terpenuhi dengan terbentuknya komunitas "Masyarakat Peduli Maladministrasi" yang beranggotakan 30 mahasiswa dan 30 pelajar. Kelompok ini aktif dalam program Ombudsman Goes To School/Campus dan pengawasan pelayanan Trans Jogja.

3. Sasaran Strategis: Dukungan Manajemen Kelembagaan

Seluruh indikator dukungan manajemen tercapai 100%.

- **Pengelolaan Kantor:**
Layanan operasional kantor di Jl. Affandi CT X/11 berjalan lancar. Dukungan manajemen berhasil memfasilitasi 404 kegiatan pemeriksaan, termasuk 146 kali kegiatan *Ombudsman On The Spot* di berbagai lokasi seperti MPP dan Puskesmas.
- **Efisiensi Sumber Daya:**
Meskipun menghadapi pemblokiran anggaran, manajemen berhasil melakukan optimalisasi melalui penggunaan teknologi (Zoom Meeting) untuk koordinasi dan memilih lokasi kegiatan *On The Spot* yang dekat untuk menekan biaya perjalanan.

3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2025 mencerminkan upaya maksimal Ombudsman RI Perwakilan DIY dalam menyalakan kebijakan efisiensi nasional.

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
Total Anggaran	844.655.000	235.250.810	609.404.190	606.540.861	99,53%

Analisis Keuangan:

1. **Dampak Pemblokiran:** Sebesar **Rp 235.250.810** (sekitar 27% dari pagu awal) mengalami pemblokiran (blokir). Anggaran yang paling terdampak adalah program substansi pengawasan dan pengendalian.
2. **Efisiensi Penyerapan:** Dari Pagu Efektif sebesar Rp 609.404.190, Ombudsman RI DIY berhasil merealisasikan **Rp 606.540.861** atau **99,53%**²⁷. Tingginya persentase realisasi ini menunjukkan perencanaan yang adaptif. Ketika blokir dibuka sebagian pada pertengahan tahun, unit kerja segera melakukan akselerasi kegiatan prioritas²⁸.
3. **Komposisi Belanja:** Realisasi terbesar dialokasikan untuk Dukungan Manajemen Internal (96,92% realisasi) dan Kebijakan Bidang Pelayanan Publik (99,95% realisasi)²⁹.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan dan operasional Tahun 2025 menunjukkan akuntabilitas yang "Sangat Baik" meskipun berada di bawah tekanan fiskal, dengan catatan evaluasi pada target penilaian kepatuhan yang perlu menjadi prioritas pemulihan di tahun mendatang.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Secara umum, kinerja Ombudsman RI Perwakilan DIY pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat positif dan akuntabel, meskipun dihadapkan pada tantangan eksternal berupa kebijakan efisiensi anggaran nasional. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Ombudsman RI Perwakilan DIY berhasil melampaui target utama dalam penyelesaian laporan masyarakat dengan capaian sebesar **123%** (274 laporan diselesaikan dari target 223).

Keberhasilan ini didorong oleh penerapan strategi inovatif **RCO+ (Reaksi Cepat Ombudsman Plus)** yang efektif memangkas birokrasi penyelesaian laporan sederhana melalui pendekatan informal. Selain itu, fungsi pencegahan maladministrasi berjalan optimal melalui penyelesaian Kajian Sistemik Tata Kelola Sampah yang menghasilkan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Daerah di DIY.

Dari sisi pengelolaan anggaran, meskipun terdapat pemblokiran (blokir) sebesar kurang lebih 27% dari pagu awal akibat Inpres No. 1 Tahun 2025, Perwakilan DIY mampu melakukan penyerapan anggaran secara maksimal pada pagu efektif yang tersedia, yakni mencapai **99,53%**. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya yang terbatas untuk tetap memberikan pelayanan publik yang prima.

B. Langkah di Masa Mendatang

Untuk mempertahankan capaian positif dan memperbaiki kendala yang dihadapi pada tahun 2025, Ombudsman RI Perwakilan DIY menyusun langkah-langkah strategis untuk peningkatan kinerja di masa mendatang sebagai berikut:

1. **Optimalisasi Teknologi Informasi:** Guna menyaingi keterbatasan anggaran dan efisiensi waktu, kegiatan koordinasi, klarifikasi awal, dan diskusi dengan instansi terlapor maupun pelapor akan semakin dimaksimalkan menggunakan media daring (*Zoom Meeting*). Langkah ini terbukti efektif menjaga ritme penyelesaian laporan tanpa membebani biaya perjalanan dinas.
2. **Strategi Jemput Bola yang Efisien:** Program *Ombudsman On The Spot* akan tetap dilanjutkan sebagai ujung tombak pelayanan proaktif. Strategi pelaksanaannya akan disesuaikan dengan memilih lokasi-lokasi strategis yang dekat dengan domisili pelaksana kegiatan atau basis massa pelapor (seperti MPP dan Puskesmas), sehingga pelayanan tetap berjalan masif dengan implikasi anggaran yang minimal.
3. **Pengawasan Isu Strategis Berkelanjutan:** Fokus pengawasan tahun depan akan diarahkan pada pengawasan implementasi saran kebijakan yang telah dikeluarkan, khususnya terkait **Tata Kelola Sampah** dan **Penataan Utilitas Fiber Optik**. Ombudsman RI DIY akan memastikan Pemerintah Daerah (Pemkab Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta) melaksanakan rekomendasi perbaikan sistem yang telah disampaikan.

4. **Perluasan Partisipasi Publik:** Penguatan jejaring "Masyarakat Peduli Maladministrasi" yang telah terbentuk dari unsur mahasiswa dan pelajar akan ditingkatkan perannya. Mereka akan dilibatkan secara lebih aktif sebagai "mata dan telinga" Ombudsman dalam memantau standar pelayanan publik di lingkungan pendidikan dan pelayanan dasar lainnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Ombudsman RI Perwakilan DIY dapat terus meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat Yogyakarta, serta mempertahankan predikat kinerja tinggi di tahun-tahun mendatang.